

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab – bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa hal yang menjadi hasil kajian terhadap permasalahan dalam penulisan ini. Pertama, kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen, yakni Pelanggan Prabayar Jasa Telekomunikasi, untuk melakukan registrasi terhadap nomor telepon yang dimilikinya. Dimana proses registrasi tersebut dapat dilakukan secara sendiri atau melalui gerai milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau gerai milik mitra. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, disebut juga sebagai pelaku usaha, akan menerima, data – data pribadi yang akan dikirimkan atau disampaikan oleh Pelanggan Prabayar Jasa Telekomunikasi, berupa 1. NIK dan 2. Nomor Kartu Keluarga. Data pribadi tersebut akan disampaikan melalui layanan pesan singkat atau *SMS* melalui Nomor *MSISDN* atau nomor telepon pelanggan. Kemudian, setelah data itu diberikan dan disampaikan, pihak Penyelenggara Jasa Telekomunikasi akan menerima data dan melakukan validasi. Validasi dalam hal ini artinya sebuah proses pencocokan data pelanggan dengan data kependudukan milik instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan.

Kemudian, dalam hal ini, Pelanggan Prabayar Jasa Telekomunikasi merupakan konsumen dari jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh pihak Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Pelanggan Prabayar Jasa

Telekomunikasi sebagai konsumen mempunyai hak – hak yang harus dijamin perlindungannya. Salah satu hak Pelanggan Prabayar Jasa Telekomunikasi adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang diberikan oleh pihak Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Bahwa ketika Pelanggan Prabayar Jasa Telekomunikasi sebagai konsumen menyampaikan data – data pribadi kepada pihak Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, harus terciptanya suatu jaminan atas kenyamanan, keselamatan, dan terutama keamanan terhadap data pribadinya. Dengan demikian, diperlukannya sebuah aturan mengenai perlindungan data pribadi untuk menciptakan dan melaksanakan jaminan atas keamanan terhadap data pribadi yang diberikan.

Pada sampai hari ini, Indonesia belum memiliki aturan mengenai perlindungan data pribadi dalam bentuk Undang – Undang. Saat ini, Indonesia baru hanya memiliki Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Namun, Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 belum cukup, hal itu disebabkan substansinya tidak memiliki prinsip – prinsip perlindungan data pribadi dari *OECD Privacy Guidelines* dan hanya memiliki cakupan pada sistem elektronik saja. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa setiap peraturan yang berhubungan dengan hak asasi manusia itu harus dibentuk dalam Undang – Undang.

5.2 Saran

Melihat bahwa pengaruh kemajuan teknologi informasi semakin berkembang dan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap data pribadi seseorang dan sangat diperlukan adanya suatu aturan dalam bentuk Undang – Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang sudah bersifat mendesak (*urgent*). Hal itu disebabkan karena Indonesia merupakan anggota dari *OECD* dan *Part Four Article 19* mendorong setiap anggotanya untuk mengimplementasikan prinsip – prinsip yang ada ke dalam sistem hukumnya. Bahwa dengan adanya Undang – Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, akan menciptakan jaminan keamanan dan juga perlindungan tidak hanya dalam kewajiban penyampaian data pribadi menurut Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017, namun dapat mewujudkan jaminan keamanan serta perlindungan tersebut di dalam bidang lain. Maka dari itu, perlindungan terhadap keamanan data pribadi menjadi penting dan patut diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dan harus segera membentuk Undang – Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dengan cara harmonisasi hukum dalam bidang perlindungan data privasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

2. Buku-Buku:

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Ahamadi Miru. Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Konsumen Di Indonesia. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- N.H.T. Siahaan. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2006.
- Sinta Dewi Rosadi. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar–Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Sudaryatmo. *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen*. PIRAC, Jakarta, 2001.

Sukanda Husin, Hukum Internasional tentang Pencegahan Perubahan Iklim.
RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2016.

3. Kamus:

Bryan A. Gardner. *Black's Law Dictionary: Seventh Edition, ST. Paul:*
West Publishing, 1999.

4. Jurnal atau Makalah atau Wawancara atau Putusan:

Az Nasution, Laporan Perjalanan Ke Daerah – Daerah Dalam Rangka
Pengembangan Perlindungan Konsumen.

Az. Nasution. Perlindungan Konsumen: Suatu Tinjauan Dari Sudut Hukum
(makalah disampaikan dalam seminar Perlindungan Konsumen, 15
– 16 Desember 1975).

Az Nasution. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU
Nomor 8 Tahun 1999. 2003.

Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003.

Sinta Dewi Rosadi. Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan
Dengan Perlindungan Data Pribadi. 11 Januari 2017.

Wawancara dengan Sinta Dewi Rosadi, Pengajar Fakultas Hukum UNPAD pada Departemen Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi, tanggal di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (2 April 2018).

5. Internet:

CNN Indonesia, Alasan Pemerintah Wajibkan Registrasi Kartu SIM, 12 Oktober 2017, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171011184315-213-247773/alasan-pemerintah-wajibkan-registrasi-kartu-sim>, diakses pada 12 April 2018, Pukul 17:27 WIB.

Mother's Maiden Name (Superpassword). Penggunaan nama ibu kandung sebagai sandi keamanan perbankan sudah terlacak sejak 1882. <https://tirto.id/kenapa-nama-ibu-kandung-yang-jadi-sandi-keamanan-czBC>, diakses 12 November 2017, Pukul 13:42 WIB.

OECD. About the OECD. <http://www.oecd.org/about/>, diakses pada 8 April 2018, Pukul 11:30 WIB.

OECD. OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personaldata. <http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheProtectionofPrivacyandTransborderFlowsOfPersonalData.htm>, diakses pada 8 April 2018, Pukul 12:00 WIB.

OECD. Soft law. <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/irc10.htm>, diakses pada 13 April 2018 Pukul 20:05 WIB.

Tirto.id, “Celah Masalah Aturan Wajib Registrasi Ulang SIM Card”, 20 Oktober, 2017, <https://tirto.id/celah-masalah-aturan-wajib-registrasi-ulang-sim-card-cyFi>, diakses pada 12 November 2017, Pukul 14:17 WIB.

Tirto.id, Sanksi Tidak Registrasi Ulang Kartu SIM Prabayar Lewat Batas Waktu, 19 Februari 2018. <https://tirto.id/sanksi-tidak-registrasi-ulang-kartu-sim-prabayar-lewat-batas-waktu-cE2E>, diakses pada 27 Maret 2018, Pukul 16:02 WIB.

Tirto.id, Kemenkominfo: Registrasi Ulang Kartu Prabayar untuk Alasan Keamanan, 2 November, 2017. https://tirto.id/kemenkominfo-registrasi-ulang-kartu-prabayar-untuk-alasan-keamanan-czr2?gclid=Cj0KCQjw8MvWBRC8ARIsAOFsvBVDSsN1k3-yED3R8Uz3qVmDefF2ZaHkZcYbtWKAknhx0i47_nXmiEAaAkgxEALw_wcB, diakses pada 12 April 2018, Pukul 17:31 WIB.

HukumOnline, “Perlindungan Data Pribadi, Masalah dalam Registrasi Kartu Prabayar” 19 November, 2017, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e872f3c0639/perlindungan-data-pribadi--masalah-dalam-registrasi-kartu-prabayar>, diakses Pada 12 November, 2017, Pukul 14:28 WIB.

HukumOnline, “Registrasi Ulang Nomor Ponsel Harus Diimbangi Perlindungan Data Pribadi” 7 November, 2017, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a01a4653a611/registrasi-ulang-nomor-ponsel-harus-diimbangi-perlindungan-data-pribadi>, diakses Pada 12 November, 2017, Pukul 13:30 WIB.

HukumOnline, “Apakah Setiap Lembaga Negara Berwenang Membentuk Peraturan Perundang-undang?”, 18 Maret, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f84433d9b94/apakah-setiap-lembaga-negara-berwenang-membentuk-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada 12 November 2017.

Hukum *Online*. Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang – undangan. 19 Mei 2014. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan>, diakses Pada 27 Maret 2018, Pukul 14:02 WIB.

KOMINFO. PROFIL. <https://www.kominfo.go.id/profil>, diakses pada 26 Maret 2018, Pukul 13:23 WIB.

KOMINFO. Renstra Kominfo 2014 – 2019. <https://www.kominfo.go.id/profil>, diakses pada 26 Maret 2018, Pukul 13:39 WIB.

Priyambodo RH (ed). “Telaah: Hak – Hak Dasar Konsumen Perlu Sosialisasi Berkesinambungan. 29 Desember 2007. <https://www.antaranews.com/berita/88305/telaah-hak-hak-dasar-konsumen-perlu-sosialisasi-berkesinambungan>, diakses Pada 20 Maret 2018, Pukul 16:05 WIB.

Tirto.id, “Kenapa Nama Ibu yang Jadi Sandi Keamanan”, <https://tirto.id/kenapa-nama-ibu-kandung-yang-jadi-sandi-keamanan-czBC>, diakses 12 November 2017.

Tirto.id, “Cara Registrasi Ulang Kartu SIM Melalui SMS untuk Semua Operator”, 30 Oktober, 2017, <https://tirto.id/cara-registrasi-ulang>

kartu-sim-melalui-sms-untuk-semua-operator-cziy, diakses pada 13
Desember 2017, Pukul 14:10 WIB.